

STUDI ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2022 DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK

Neneng Anjarwati,¹ Ronni Juwandi,² Ratna Sari Dewi³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
e-mail : nanjarwati47@gmail.com, ron_roju@untirta.ac.id, ratna@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan hasil sebagai berikut : 1) Partisipasi Politik Masyarakat Desa di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak dapat dianggap cukup bagus kecuali di Desa Kadu Agung Tengah yang dibuktikan dengan tingkat partisipasi politik pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 diatas 85% kecuali Desa Kadu Agung Tengah. 2) Tingginya Partisipasi Politik Masyarakat Desa di empat Desa yang melaksanakan Pilkades Serentak 2022 di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak dipengaruhi oleh faktor pemberian paket sembako dan janji kemudahan akses bantuan serta program pemerintah bagi masyarakat yang mendukung kepala desa terpilih. 3) Rendahnya angka partisipasi masyarakat Desa Kadu Agung Tengah adalah kurangnya kesadaran politik yang ditunjukkan masyarakat desa Kadu Agung Tengah dan lebih memilih tetap bekerja pada hari pencoblosan.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Desa dan Partisipasi Politik Masyarakat Desa.

Abstract

This research to analyze community political participation in the simultaneous village head election in 2022 in Cibadak District, Lebak Regency. This research uses descriptive qualitative method. This research found the following results: 1) Village Community Political Participation in Cibadak Subdistrict, Lebak Regency can be considered quite good except in Kadu Agung Tengah Village as evidenced by the level of political participation in the simultaneous village head elections in 2022 above 85% except for Kadu Agung Tengah Village. 2) The high political participation of village communities in the four villages that are carrying out the 2022 simultaneous Pilkades in Cibadak District, Lebak Regency is influenced by the factor of providing food packages and promises of easy access to assistance and government programs for communities that support elected village heads. 3) The low participation rate of the people of Kadu Agung Tengah Village is the low political awareness shown by the people of Kadu Agung Tengah Village and preferring to keep working on election day.

Keywords: Village Head Election and Village Community Political Participation.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa merupakan agendapolitik yang sudah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat desa di Indonesia. Sepanjang sejarahnya, pemilihan kepala desa khususnya di pulau jawa dipilih dengan cara penunjukkan langsung oleh raja. Sementara pada masa kolonial, kepala desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan Asisten Residen dan Patih (Abdul Muis : 2006).

Pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa sebagai kesatuan wilayah terendah mengalami penyeragaman status melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sehingga Desa menjadi wilayah terkecil yang memiliki struktur pemerintah di negara ini. Penyeragaman status ini juga melahirkan gagasan pemilihan kepala desa yang dipilih secara langsung oleh warga, dengan beberapa syarat bagi pemilih dan calonnya (Abdul Muis : 2006).

Damsar (2013) mendefinisikan partisipasi sebagai peranan atau ikut serta dalam kegiatan. Sementara Winardi (2012) mengemukakan partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggungjawab untuk melakukan hal tersebut.

Miriam Budiarto (2013) menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Konsepsi partisipasi politik yang diajukan Miriam Budiarto tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh pendapat ahli sebelumnya yaitu Herbert McClosky yang berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat untuk ambil bagian dalam proses pemilihan penguasa ataupun dalam proses pembentukan kebijakan umum (Miriam Budiarto, 2013).

Sementara Soekanto (2006) menyebutkan bahwa para ahli sosiologi Max Weber memberikan pengertian masyarakat sebagai suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Sementara Selo Soemardjan memberikan arti masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Miriam Budiarto (2013) mengungkapkan terdapat dua pola dalam menggambarkan partisipasi masyarakat dalam bentuk piramida di negara demokrasi, yaitu :

1) Pola Partisipasi I

Pola ini didasarkan pada gambaran masyarakat Amerika sebagai negara demokratis yang diajukan oleh Milbrath and Goel dimana partisipasi masyarakat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :

- a. Partisipasi politik apatis (*Apathetics*), orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kategori ini berada pada lapisan bawah piramida dengan persentase sekitar 33% dari populasi.
- b. Partisipasi politik penonton (*Spectators*), orang yang setidaknya-tidak pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Kategori ini berada pada lapisan tengah piramida dengan persentas 60% populasi.
- c. Partisipasi politik pemain (*Gladiators*), mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan

pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. Kategori ini berada pada puncak piramida dengan persentase 5 - 7% populasi.

2) Pola Partisipasi II

Pola ini didasarkan pada gambaran yang dicetuskan oleh David F Roth dan Frank L. Wilson, melihat masyarakat terbagi dalam empat kategori :

- a. Aktivis (*Activists*), orang yang secara aktif terlibat dengan kegiatan politik seperti pejabat publik, pengurus partai politik, bahkan orang yang melakukan tindakan kejahatan / menyimpang dengan tujuan politik.
- b. Partisipan (*Perticipants*), orang yang bekerja untuk kampanye, Anggota partai secara aktif, Partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis.
- c. Penonton (*Onlookers*), orang yang menghadiri reli-reli politik, anggota dalam kelompok kepentingan, pe-lobby, pemilih, orang yang terlibat dalam diskusi politik, pemerhati dalam pembangunan politik.
- d. Apolitis (*Apoliticals*), orang yang bersikap anti politik, atau tidak peduli dan tidak pernah melibatkan diri dalam kegiatan politik.

Samuel Huntington dan Joan Nelson (1994) dalam konteks kenegaraan, partisipasi politik rakyat adalah keterlibatan rakyat secara perseorangan (*privat citizen*) untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi dan memprotes suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan mereka. Dari konsepsi tersebut diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik dan pelaksanaan pembangunan di lingkungan / wilayah hidupnya.

Ramlan Subarki (2010) menyatakan ada beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat, yaitu:

1) Kesadaran politik.

Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, baik itu hak politik untuk memilih, hak ekonomi, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban dalam segala urusan politik.

2) Kepercayaan terhadap pemerintah.

Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan penilaian masyarakat kepada pemerintah. Apakah masyarakat menilai pemerintah dapat dipercaya dan dipengaruhi atau tidak.

3) Faktor Lain

Faktor lain yang dapat mempengaruhi partisipasi warga negara pada pemilihan adalah keluarga (keturunan), ekonomi, pekerjaan, status sosial, usia dan afiliasi politik orang tua.

Faktor kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan bukan variabel independen (bebas) dan turut dipengaruhi oleh faktor lain tersebut.

Miriam Budiarto (2013) mengatakan dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat merupakan tolak ukur akan keberhasilan sistem politiknya, dalam artian semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat maka dianggap berhasil sistem politiknya, akan tetapi sebaliknya jika partisipasi politik masyarakat rendah maka dikatakan sistem politiknya tidak baik, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang tidak memiliki sifat dan perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Lebih lanjut Miriam Budiarto (2013) menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, status dan pendapatan atau situasi lingkungan politik. Orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi, memiliki status sosial yang baik serta pendapatan yang memadai cenderung tinggi tingkat partisipasinya dari pada orang yang berlatar belakang pendidikan rendah dan berpendapatan rendah.

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengandung konsekuensi disiapkannya anggaran negara sebagai sumber keuangan pemerintah desa untuk mengelola potensi desa. Hal ini kemudian membuat desa menjadi pemilihan kepala desa semakin menarik. Apabila dahulu jabatan Kepala Desa diperebutkan karena mendapatkan hak dari hasil bumi tanah bengkok (tanah milik desa) sebagai sumber penghasilan, pada masa sekarang Kepala Desa telah memiliki penghasilan tetap (gaji), tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan. Namun, adanya pemilihan langsung sepanjang perkembangan politik di Indonesia nyatanya tidak otomatis membawa dampak positif dan seringkali mengalami pasang surut bila dilihat dari angka partisipasi dan kualitas pemilihan kepala desa. Fokus penelitian ini ada pada analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan (trianggulasi). Informan penelitian ini adalah panitia pilkades, masyarakat sebagai pemilih, dan calon kepala desa. Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data

model interaktif (*interactive model of analysis*) yang terdiri dari tiga komponen analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*data conclusion: drawing/verying*) (Miles dan Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara rinci, tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa serentak 2022 di Kecamatan Cibadak peneliti sajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pilkades Serentak Tahun 2022 di Kecamatan Cibadak

Nama Desa	Jumlah DPT	Jumlah Suara		Total Hadir	Persentase Partisipasi
		Suara Sah	Tidak Sah		
Asem Margaluyu	3.141	2.699	48	2.747	87,46 %
Cimenteng Jaya	1.341	1.246	7	1.253	93,44 %
Mekar Agung	3.128	2.645	16	2.661	85,07 %
Kadu Agung Tengah	2.688	1.837	90	1.927	71,69 %
Asem	2.353	2.097	19	2.116	89,93 %
Total	12.651	10.524	180	10.704	84,61 %

Sumber : Panitia Pilkades Kecamatan Cibadak (2022)

Dari data diatas secara berurutan desa dengan tingkat partisipasi tertinggi adalah Desa Cimenteng Jaya, (93,44 %) dan Desa dengan tingkat partisipasi terendah adalah desa Kadu Agung Tengah (71,69 %).

Faktor Kesadaran Politik

Terdapat tiga sub indikator kesadaran politik yaitu pengetahuan, pemahaman dan sikap seseorang tentang politik. Adapun hasil wawancara dari para informan sebagai berikut:

a. Pengetahuan

Semua informan mengetahui jumlah calon kepala desa sekalipun tidak semuanya mengetahui nama setiap calon kepala desa di desanya. Selain itu, tidak semua informan mengetahui visi misi ataupun program kerja setiap calon kepala desa di desanya. Tetapi, terdapat informan yang benar-benar tidak tahu sama sekali visi, misi dan program kerja calon kepala desa.

b. Pemahaman

Setiap informan memiliki pemahaman yang bervariasi pada setiap butir pertanyaan. Namun, seluruh informan memahami bahwa memilih pada pemilihan umum adalah hak individu dan dapat mempengaruhi kemajuan desa di masa depan. Tidak seluruh informan mengetahui tugas dan wewenang kepala desa serta memahami cara kepala desa terpilih mewujudkan visi, misi dan rencana program kerja yang telah dibuatnya pada masa

kampanye. Sebagian informan mengetahui dan mengakui bahwa pada dasarnya terwujudnya visi, misi dan rencana program kerja yang telah dibuat oleh calon kepala desa akan bergantung pada musyawarah desa dan tersedianya anggaran yang dibutuhkan.

c. Sikap

Sebagian besar informan penelitian memastikan dirinya tercatat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan hadir ke TPS untuk memberikan suaranya pada pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2022. Terdapat 2 orang informan penelitian yang mengakui pada awalnya ia merasa malas untuk mencoblos, tetapi karena diingatkan keluarganya ia memilih untuk memberikan suaranya pada pemilihan Kepala Desa.

Sebanyak tiga belas informan penelitian mengakui menerima paket sembako dan amplop agar datang ke TPS untuk memilih salah satu calon kepala desa. Sementara enam belas informan penelitian mengakui dijanjikan kemudahan akses dan jaminan mendapatkan program pemerintah baik pembangunan yang di inisiasi pemerintah desa maupun program bantuan sosial pemerintah pusat dan daerah.

Kepercayaan Terhadap Pemerintah

a. Keluarga

Terdapat 7 informan penelitian yang mengakui adanya hubungan dengan tim pemenangan calon kepala desa tersebar di seluruh desa. Sementara sisanya tidak mengakui adanya afiliasi (hubungan) dengan tim pemenangan calon kepala desa atau calon kepala desa. Secara keseluruhan informan penelitian tidak memiliki ikatan keluarga dengan pemerintah desa, dan kepala desa sebelumnya.

b. Afiliasi Politik

Tidak seluruh informan mengenal setiap calon tetapi minimal masing-masing informan mengenal 2-3 figur calon kepala desanya. Persetujuan dinyatakan hampir seluruh informan terhadap visi misi dan rencana program kerja yang telah dibuat apabila dijalankan. Dengan alasan, visi misi calon selalu bagus, dan yang menjadi tantangan adalah menjalankannya, hal ini disampaikan Bapak Ucun yang mengaakan “Semua visi bagus, yang susah menjalankannya”.

Seluruh informan tidak terlibat aktif dalam kegiatan kampanye calon kepala desa kecuali informan yang berstatus calon kepala desa. Hal ini berarti informan adalah peserta pasif. Sebagai peserta pasif, para informan mendapatkan janji yang hampir umum / sama disetiap desa, yaitu adanya janji apabila calon kades menang, maka pendukungnya akan mendapatkan prioritas untuk mengerjakan pekerjaan (pemberdayaan) dalam kegiatan pembangunan desa, dan mendapatkan kemudahan dalam proses pemberian bantuan sosial.

Adapun pertanyaan tentang kepercayaan kepada pemerintah desa sebelumnya yaitu “Bagaimana menurut anda tentang pemerintah desa sebelumnya sebelumnya?” informan Ucu dan Supandi mengatakan hal yang sama bahwa

“Pada masa-masa awal pemerintahan desa dimulai semuanya tampak baik. Tetapi memasuki pertengahan masa pemerintahan, terjadi penurunan kualitas layanan. Hal ini terjadi karena adanya pandemi covid 19, yang menuntut perubahan penggunaan anggaran dana desa yang digunakan untuk bantuan pemerintah akibat covid 19. Pada masa inilah terjadi ketimpangan data penerima bantuan sosial antara TKSK, Jamsosratu, dan bantuan Covid 19. Ada warga yang bisa mendapatkan ketiga bantuan, sementara ada juga warga yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan padahal ia sangat membutuhkan”. (Hasil wawancara Informan penelitian Desa Asem Margaluyu).

Seluruh Informan kecuali di Desa Cimenteng Jaya pada dasarnya mengalami kekecewaan kepada pemerintah desa sebelumnya yang disebabkan adanya ketimpangan data penerima bantuan sosial semasa pandemi COVID-19.

Keamanan

Seluruh informan juga tidak merasa stress atau tertekan dan pernah ditekan pihak lain selama tinggal di desanya. Miriam Budiarjo (2013) menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, status dan pendapatan atau situasi lingkungan politik. Orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi, memiliki status sosial yang baik serta pendapatan yang memadai cenderung tinggi tingkat partisipasinya dari pada orang yang berlatar belakang pendidikan rendah dan berpendapatan rendah. Hal ini dibuktikan pada penelitian ini dimana para informan yang bekerja sebagai petani dan buruh relatif memiliki faktor kesadaran politik yang rendah.

Petani dan buruh yang rata-rata memiliki pendidikan hanya sampai tingkat SMA, dan hanya berpenghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari akan lebih memilih tetap bekerja daripada datang ke TPS untuk memilih kepala desa baru. Adanya timbal balik dari calon kepala desa berupa paket sembako dan uang kepada masyarakat yang memberikan dukungan dan pilihannya menjadi faktor yang mempengaruhi niat masyarakat yang malas datang ke TPS.

Informan penelitian yang merupakan calon kepala desa yang telah terpilih bapak ‘A’ mengakui bahwa dirinya selama kampanye dan dalam kesehariannya selalu mengatakan untuk mendukung dirinya dan menjanjikan kemudahan dan jaminan mendapatkan bantuan sosial ataupun program pemerintah lainnya apabila ia terpilih. Upayanya telah membawa dampak positif bagi Bapak ‘A’ yang kemudian terpilih pada pilkades Serentak 2022.

Tidak ada masalah atau kendala yang menghambat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa serentak 2022 yang berasal dari panitia pemilihan kepala desa serentak

2022. Segala kesalahan penulisan nama, tidak tercatatnya warga pada Daftar Pemilih Tetap, dan Pengarutan Jadwal kampanye menjadi faktor pendukung bagi suksesnya pemilihan kepala desa serentak 2022.

Namun, khusus desa Kadu Agung Tengah mengapa tingkat partisipasinya begitu rendah adalah karena banyaknya warga desa yang bekerja di luar kota, serta penghasilan harian yang didapatkan saat bekerja masih lebih tinggi daripada pemberian calon kepala desa. Sehingga, minat dan perhatian warga desa Kadu Agung Tengah terhadap pemilihan kepala desa sangat kurang.

Hasil pengamatan peneliti, dari ke-lima desa yang melaksanakan pilkades serentak 2022 di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, calon Kepala Desa terpilih di empat desa merupakan calon kepala desa baru dan bukan merupakan incumbent. Hanya desa Cimenteng Jaya yang berhasil dimenangkan oleh kepala desa incumbent. Hal ini menandakan kepuasan masyarakat desa di empat desa peserta pilkades serentak 2022 di Kecamatan Cibadak sangat rendah terhadap kinerja kepala desa sebelumnya.

Pada penelitian ini, peneliti juga menemukan hasil bahwa terdapat pola partisipasi apolitis, penonton dan pemain. Tingkat partisipasi politik yang ditunjukkan masyarakat desa Kadu Agung Tengah menandakan sikap apolitis masyarakat desa Kadu Agung Tengah begitu tinggi, disamping rendahnya kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa yang dipimpin kepala desa sebelumnya (incumbent) sangat rendah.

SIMPULAN

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi pemilih pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak yaitu :

- a. Faktor Kesadaran Politik. Hampir semua masyarakat memiliki pengetahuan apa dan tujuan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2022 di Kecamatan Cibadak sehingga masyarakat di 4 desa antusias dan mau pergi ke TPS dan memilih (mencoblos) calon kepala desa dengan niat sendiri.
- b. Pemahaman. Hampir semua masyarakat memiliki pemahaman akan pentingnya pemilihan kepala desa meskipun tidak mengetahui semua visi misi dan rencana program kerja setiap calon. kepala desa.
- c. Sikap. Kehadiran masyarakat di TPS pada pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2022 di Kecamatan Cibadak dipengaruhi oleh adanya pemberian paket sembako dan uang saat kampanye oleh calon kepala desa.

- d. Afiliasi Politik. Janji kemudahan dalam mendapatkan bantuan sosial menjadi faktor penarik minat pemilih untuk datang ke TPS dan mencoblos.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana.
- Muis, Abdul. (2006). Pemilihan Kepala Desa Sebagai Acuan Empiris Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung (Ditinjau dari Perspektif Historis). *Jurnal Desentralisasi* Vol. 7 No. 4..
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ramlan Surbakti. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Winardi, (2012). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumni Departemen pekerjaan umum.